

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang diuraikan pada Bab V, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Perbandingan Kinerja PAD Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Malaka

Rasio pengukuran kinerja PAD	Tahun anggaran			
	2011	2012	2013	2014
Rasio kemandirian	5%	6%	9%	9%
Rasio efektifitas	66,44%	79,20%	106,65%	109,91%
Rasio pertumbuhan PAD	35%	35%	36%	10%
Rasio derajat desentralisasi	5,25%	6,07%	7,58%	11,86

1. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu sebelum pemekaran.
 - a. Jika di nilai dari Rasio kemandirian selama 2011-2012 dinilai kurang baik karena pemerintah kabupaten Belu belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah walaupun rasio kemandiriannya meningkat..
 - b. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu di nilai dari rasio Efektifitas dapat dikatakan kurang efektif dari tahun 2011-2012.
 - c. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu di nilai dari Rasio Pertumbuhan dikatakan baik karena pada tahun 2012 di harapkan PAD seperti yang ditargetkan pada tahun 2011.

- d. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu di nilai dari derajat desentralisasi dari tahun 2011-2012 dikatakan pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi
2. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu setelah pemekaran
 - a. Jika di nilai dari Rasio kemandirian selama 2013-2014 dinilai kurang baik karena pemerintah kabupaten Belu belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah karena pada tahun 2013-2014 tidak mengalami peningkatan
 - b. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu di nilai dari rasio Efektifitas dapat dikatakan sangat efektif dari tahun 2013-2014 karena anggaran yang di targetkan dapat terealisasikan.
 - c. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu di nilai dari Rasio Pertumbuhan dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan dari tahun 2013-2014.
 - d. Kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Belu di nilai dari derajat desentralisasi dari tahun 2013-2014 dikatakan pemerintah daerah tidak mampu menyelenggarakan desentralisasi.

6.2.SARAN

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan dan analisis pada Bab V, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh kabupaten Belu, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Jika

Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

2. Pemerintah daerah lebih memanfaatkan potensi daerah seperti pajak dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan sendiri. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan.
3. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah perlu meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan perlu meningkatkan kemandirian dalam mengelola potensi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra,2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*,Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Halim,abdul,2002.*Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Iskandar,2009. *Metodologi Penelitian*,Jakarta,GP Press
- Kesit,Bambang Prakoso.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*.Jakarta,Erlangga.
- Kaho,Yosef Riwu.1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Republic Indonesia*.Jakarta.Rajawali Pers.
- Kaho,Yosef Riwu.1997.*Prospek Otonomi Daerah DiRepublic Indonesia*.Jakarta.Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi.2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UUP STIM YKPN
- Mahmudi,2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.UUP STIM YKPN.
- Munawir, H S,1997. *Perpajakan*. Jogjakarta. Liberty
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*.jogjakarta ANDI Yogyakarta.
- Marhayudi,Putut.2002 .*Pemerintah Daerah*. Jakarta.ISSME
- Sujamto.1990.*Otonomi Daerah*.Jakarta
- Siahaan, Marihot Pahala,2010.*Pajak Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.Jakarta,Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000. Jakarta
- Undang – Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah.Jakarta.
- Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.